

# PERUBAHAN SISTEM WARNA MENJADI WANGSA, LABELING KASTA PADA MASYARAKAT BALI

**I Gusti Ketut Widana**  
igustiketutwidana1805@gmail.com

**I Gede Widya Suksma**  
suksma@unhi.ac.id

Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Pendidikan  
Universitas Hindu Indonesia

proses review tanggal 25-26 oktober 2021 – dinyatakan lolos 27 oktober 2021

## ABSTRAK

Setidaknya ada beberapa ikatan yang membuat kehidupan masyarakat Bali terikat kuat, seperti sistem “Warna”, kemudian berkembang menjadi “Wangsa”, yang ternyata tidak dapat dilepaskan dari “Soroh”, semacam pengelompokan masyarakat berdasarkan hubungan darah dengan mengikuti garis keturunan “Purusa” secara vertikal. Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan “Warna, Wangsa, dan Soroh” ini acapkali diidentikkan, bahkan dengan tegas disebutkan sebagai bentuk “Kasta”, terlebih dilengkapi pula dengan embel-embel “titel/gelar” masing-masing beserta struktur hierarki yang begitu rupa dikenal dan diterima sebagaimana adanya di tengah masyarakat Bali yang notabene beragama Hindu. Perubahan sistem Warna menjadi Wangsa inilah kemudian menjadi semacam labeling adanya sistem Kasta pada masyarakat Bali.

**Kata kunci : warna, wangsa, kasta**

## ABSTRACT

*At least there are some ties that make Balinese people's lives strongly bound, such as the "Color" system, which later developed into "Wangsa", which apparently cannot be separated from "Soroh", a kind of grouping of people based on blood relations by following the "Purusa" lineage vertically. In subsequent developments, the existence of "Color, House, and Soroh" is often identified, even explicitly mentioned as a form of "Casta", moreover it is also equipped with the appendages of "titles/titles" for each along with a hierarchical structure that is so well known and recognized. accepted as it is in the midst of Balinese society who incidentally is Hindu. This change in the Color system to Wangsa then became a kind of labeling the existence of a caste system in Balinese society.*

**Keywords: color, clan, caste**

## 1. PENDAHULUAN

Perihal “Warna”, tepatnya “Catur Warna”, sejatinya merupakan ajaran Hindu yang bersumber dari kitab suci, seperti misalnya disuratkan di dalam Bhagawadgita, IV. 13 (Pudja, 1981 : 104) yang dengan tegas menyatakan berbasis “guna-karma” (sifat, bakat/pembawaan dan pekerjaan) yang kemudian diartikan sebagai bentuk pembagian lapangan pekerjaan (profesi). Meskipun secara konseptual ajaran *Catur Warna* tetap ajeg, namun dalam perkembangannya terjadi “pengaburan” bahkan dapat disebut “penyimpangan” (Widana, 2009 : 92). Konsep dasar *Catur Warna* tidak lagi diwarisi “ajarannya” tetapi justru diklaim sebagai “hak identitas” dengan tetap melekatkan istilah pembagian/pengelompokkannya oleh generasi keturunannya. Sehingga *Catur Warna* dengan pembagian kerja atas dasar asas profesionalitas dengan rincian *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra*, berubah menjadi berdasarkan rekam jejak identitas (genealogis), walaupun keturunannya tidak lagi menjalani atau bergerak di bidang kehidupan sebagaimana *Warnanya*.

*Catur Warna* model perubahan (atau penyimpangan) inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi “Wangsa”, dengan mengeleminasi asas profesionalitas yang menjadi landasan konsepsinya. Muncullah *Catur Wangsa* (dengan hanya mengambil istilah dalam pembagiannya), yang sebenarnya kini hanya berfungsi sebagai pengingat sekaligus pengikat garis keturunan (genealogis), sehingga dengan mudah diketahui jejak identitas asal usul kelahirannya. Meskipun demikian, terutama untuk mereka yang tergolong keturunan *Tri Wangsa* (*Brahmana*, *Ksatria*, dan *Waisya*), secara sosial tradisional tetap mendapat perlakuan berbeda, bahkan penghormatan

“lebih” dari pada masyarakat kebanyakan (*Sudra*) yang terlanjur berposisi sebagai “wong jaba” dan acapkali disebut “panjak/parekan” (semacam abdi atau hamba sahaya di lingkungan kerajaan). Kalaupun tidak semua masyarakat bisa menerimanya, diakui ataupun tidak bentuk “kultus feodalisme” melalui *Wangsa* yang berhimpitan dengan *Soroh* dan diidentikkan sebagai *Kasta* ini tetap eksis di tengah masyarakat Bali (Hindu) hingga sekarang.

Adanya pembeda perlakuan antara orang/kelompok tertentu terutama yang berasal dari kalangan *Tri Wangsa* dengan golongan *Sudra Wangsa* ini, rupanya kemudian disebut-sebut sebagai bentuk “Kasta” ala Bali yang konsepsi dasarnya paradok dengan *Catur Warna*. Jika *Catur Warna* dengan jelas dan tegas merupakan ajaran Hindu tentang bagaimana setiap orang bisa memilih dan melakoni bidang kehidupan sesuai dengan sifat/bakat (*guna*) dan pekerjaan (*karma*) yang dijalani. Sementara *Catur Wangsa* yang hanya mengambil istilah dalam pembagian *Catur Warna*, justru berkembang, tepatnya menjelma menjadi bentuk “klaim identitas” sebagai warisan yang seakan wajib hukumnya diteruskan secara turun temurun menurut *Soroh* atau idem dito dengan *Kasta* masing-masing.

Pengertian *Kasta* inipun belakangan berkembang meluas, tidak saja sebagai bentuk pembeda atas dasar keturunan (genealogis), tetapi bisa juga berdasarkan atas status (sosial, ekonomi), pangkat/jabatan, golongan atau apa saja yang menjadikan seseorang atau kelompok orang berbeda satu dengan lainnya. Celaknya perbedaan itu cenderung ditarik menurut garis vertikal (atas-bawah/tinggi-rendah) yang dalam praktiknya bernuansa diskriminatif. Sehingga model “Kasta” seperti ini cenderung dinilai negatif, bisa juga digunakan sebagai alat agitatif dan provokatif, karena ada kelompok yang

merasa/menganggap dirinya lebih tinggi (atas) dari kelompok lainnya yang diposisikan lebih rendah (bawah). Tidak heran, sepanjang membicarakan tentang “Kasta” yang embrionya berawal dari *Warna*, *Wangsa* dan *Soroh*, akan selalu mendapat tantangan dan tentangan dari pihak yang merasa tidak dianggap setara sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan.

Belum lagi jika urusan *Warna*, *Wangsa*, *Soroh* dan atau *Kasta* dikaitkan dengan sumber teks sebagai penguat, tepatnya pembenar eksistensi berupa *Prasasti*, *Purana*, *Babad*, *Lontar* atau *Lelintihan* beserta kandungan histori yang tidak jarang dikemas dalam format mitologi berdasarkan *gugon tuwon aja wera* dan prinsip *anak mulo keto* (memang sudah demikian adanya), yang seakan tidak dapat dibantah “isi/kebenarannya”. Ditambah kemudian dengan embel-embel “titel/gelar” masing-masing *Warna/Wangsa/Soroh*, semakin menguatlah aroma “Kasta” sekaligus mengentalnya aliran darah diskriminasi antar individual/personal dalam interaksi sosial di tengah kehidupan masyarakat tradisonal Bali yang sebenarnya dikenal sangat kolegal dan atau komunal, namun berkarakter “etnososiofeodalistik” (Widana, 2009 : 92).

## 2. METODE

Rancangan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dimana .Sumber data yang dihimpun menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi terhadap sumber asli yaitu guru, Pemerintah dan Siswa sedangkan sumber sekunder dari sumber yang kedua yaitu buku, majalah, dokumen tertulis dan sumber kepustakaan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data diataranya adalah teknik observasi dengan pengamatan langsung dan terus terang,

teknik wawancara dengan terstruktur, teknik studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif yaitu analisis data diperoleh dengan tiga hal reduksi data, penyajian data dan analisis data.

## 3. PEMBAHASAN

Membahas lebih jauh tentang *Warna*, dan *Wangsa*, lalu kaitannya dengan *Soroh*, hingga kemudian dilabeling sebagai bentuk *Kasta* di Bali, perlu kiranya ditelisik asal muasalnya, baik secara etimologis maupun historis, seperti berikut.

### 1. Warna

*Warna* (teks asli ditulis *Varna*) dalam *Catur Warna* berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata "*Catur*", berarti ‘empat’ dan "*Warna*" yang berasal dari urat kata “*Wr/Vr*” (baca: *Wri*) yang artinya ‘memilih’. *Catur Warna* berarti empat pilihan hidup atau empat pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas sifat, bakat atau pembawaan (*guna*) dan kemampuan kerja (*karma*) seseorang (Putra, dkk (ed), 2013 : 145). *Catur Warna* itu merupakan ajaran Hindu tentang pembagian kerja (*swakarma*) dan kewajiban (*swadharna*) seseorang dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat.

Menunjukkan bahwa konsep *Catur Warna* merupakan sebuah ajaran Hindu, ada beberapa sumber tektual yang menyatakannya, diantaranya kitab suci *Bhagwadgita*, IV. 13 dan XVIII. 41 :

*Caturvarnyah maya srstam  
gunakarmavibhagasah  
tasya kartaram api mamm  
viddhy akartaram avyayam;  
Brahmanaksatriavisam  
sudranam ca paramtapa  
svabhavaprabhavair gunaih*

Artinya:

*Catur Warna Kuciptakan menurut pembagian dari guna dan karma (sifat dan pekerjaan). Meskipun Aku sebagai penciptanya, ketahuilah Aku mengatasi gerak dan perubahan; O Arjuna, tugas-tugas adalah terbagi menurut sifat, watak kelahirannya sebagaimana halnya Brahmana, Ksatria, Waisya dan juga Sudra (Pudja, 1981 : 104, 396).*

Suratan sloka Bhagawadgita di atas menegaskan, *Catur Warna* itu adalah ajaran tentang bagaimana kehidupan ini dapat berlangsung dengan cara berbagi bidang pekerjaan (*karma*) menurut sifat, bakat atau pembawaan (*guna*) masing-masing. Sebab tidak setiap orang dapat melakukan berbagai jenis/bidang pekerjaan. Jika struktur anatomi manusia digali potensinya, maka secara umum dapat digambarkan bahwa apa yang dilakukan/dikerjakan seseorang, antara lain berasal dari kemampuan intelegensi dan intuisi (otak/pikiran, dan perasaan), dalam konteks *Catur Warna* menjadi bidang tugas golongan *Brahmana*. Kemudian bagi mereka yang lebih mengandalkan penggunaan fisiologi dan intelengensi (fisik/kekuatan, dan kecerdasan) menjadi tugas kalangan *Ksatria* yang banyak bergerak di bidang kepemimpinan atau pemerintahan. Sementara yang berperan sebagai penyangga kehidupan guna memutar roda ekonomi dan materi untuk kesejahteraan bersama (*society*) dilakoni kaum *Waisya*. Sedangkan bagi yang tidak berkemampuan pada tiga bidang di atas, mereka lebih banyak bergerak membantu golongan *Brahmana*, *Ksatria* dan *Waisya*, sebagai bentuk pelayanan atau pengabdian, yang kemudian disebut sebagai kelompok *Sudra*.

Perihal ini, di dalam kitab suci Rg Weda, mandala X, digambarkan tentang *Catur Warna* yang secara mitologis dikatakan lahir dari Dewa Brahma. *Warna*

diceritakan lahir dari mulut Dewa Brahma (pemberi pencerahan), *Ksatria* dari tangannya (memerintah), *Waisya* dari perutnya (tanda kesejahteraan), sedangkan *Sudra* dari kakinya (pelayanan). Mitologi ini melukiskan bahwa semua *Warna* adalah ciptaan Brahma (manifestasi Tuhan sebagai pencipta) dengan kewajiban (*swadharma*) yang berbeda-beda, namun satu sama lain memiliki peran penting bagi keberlangsungan, bahkan juga untuk melindungi alam/jagat ini, sebagaimana ditegaskan di dalam suratan kitab suci Manawa Dharmasastra, I. 87 :

*Sarwasya sya tu sargasya  
guptyartham sa mahadyutih  
mukha bahu rupajanam  
prthak karmanya kalpayat*

Artinya:

Untuk melindungi alam ini, Tuhan Yang Maha Cemerlang menentukan kewajiban yang berlainan terhadap mereka yang lahir dari mulutnya, dari tangannya, dari pahanya dan dari kakinya (Pudja dan Sudharta, 1977/1978 : 52).

Ditambahkan pula di dalam kitab suci Slokantara, 61/78 :

*Lalatajyate wiprah ksatriyo  
bahujastatha,  
Urubhyam jayate waisyah sudrastu  
padajastatha.*

Artinya :

*Orang Brahmana lahir dari kepala,  
Ksatria itu lahir dari tangan,  
Orang Waisya lahir dari paha, dan  
Sudra lahir dari kaki Brahma Sidharta, 1982  
: 93).*

Dari kedua sloka kitab suci diatas, yang dimaksud lahir dari kepala (mulut), tangan, paha dan kaki tiada lain adalah : *Brahmana* yang membidangi urusan keagamaan/kerohanian, *Ksatria* bidang pemerintahan, *Waisya* memberikan kesejahteraan, dan *Sudra* membantu dalam pelayanan. Keempat *Warna* ini dibedakan kewajibannya agar masyarakat dan dunia terlindung dari kehancuran. Ini menandakan fungsi, peran, tugas, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing *Warna* sama penting dalam melangungkan perikehidupan bersama. Singkat kata, untuk menentukan corak *Warna* seseorang, adalah berdasarkan atas ‘bagaimana’ sifat, bakat atau pembawaan (*guna*) dan ‘apa’ yang dilakukan atau dikerjakannya (*karma*), bukan dari keturunan ‘siapa’ mereka berasal.

*Catur Warna* sesungguhnya adalah suatu konsepsi sekaligus komposisi struktur kemasyarakatan Hindu yang diwahyukan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam beberapa sumber kitab suci seperti dikutip di atas. Tafsiran atas kandungan maknanya pun tidak bersifat *zakellijk* (kaku) tetapi fleksibel. Artinya setiap orang atau siapapun dapat dijadikan/menjadi golongan *Warna* yang manapun, apakah itu *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya* atau *Sudra*. Semuanya tergantung pada “guna” (sifat, bakat, atau pembawaan) dan “karma” (kemampuan kerja) masing-masing orang. Intinya, *Catur Warna* adalah bentuk ajaran Hindu yang memberikan tuntunan bahwa setiap orang dapat mengambil fungsi, peran, tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam hidupnya untuk menjalani bidang-bidang pekerjaan yang diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan bersama di dunia ini guna mencapai *moksartam jagadhita* -- kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.

Ditelusuri secara histori, konsep *Catur Warna* sudah diturunkan melalui wahyu Tuhan seperti disuratkan di dalam

Weda pada Purusa Sukta Rg Weda Mandala X, sekitar 6.000 tahun sebelum masehi. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri sudah mulai dikenal ketika agama Hindu masuk ke bumi Nusantara yang ditandai dengan keberadaan kerajaan Hindu tertua di Kutai (abad ke- 4 masehi). Setidaknya di dalam Prasasti Yupa sudah disebutkan tentang pendirian tugu peringatan atas terlaksananya upacara *yadnya* (kurban) oleh para *Brahmana*, yang kemudian oleh Raja Kutai Mulawarman atas jasanya diberikan hadiah berupa ratusan sapi (Ardhana, 2002 : 24).

Menguatkan pendapat di atas, kedatangan agama Hindu di bumi Nusantara juga didalilkan melalui teori *Catur Warna*. Dinyatakan bahwa semua golongan, baik *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya* maupun *Sudra* sama-sama mengambil peran sesuai bidang tugas atau lapangan kehidupan yang dijalannya dalam proses masuk dan diterimanya agama Hindu di Nusantara. Teori *Brahmana* (JC. Van Leur), menyatakan bahwa golongan *Brahmana* yang bergerak di bidang keagamaan/kerohanian, berperan sebagai pemimpin upacara agama sekaligus turut andil dalam menyebarluaskan ajaran Hindu pada masyarakat setempat. Teori *Ksatria* (C.C. Berg) menyatakan bahwa golongan *Ksatria* melalui bidang pemerintahan turut andil memengaruhi model sistem kerajaan menurut ajaran Hindu. Lalu Teori *Waisya* (N.J. Krom), yang bergerak di bidang usaha perdagangan (ekonomi) berperan dalam interaksi dengan masyarakat Nusantara. Kemudian Teori *Sudra* (Van Faber) menyebutkan golongan ini turut datang berimigrasi ke Nusantara lalu aktif berinteraksi dengan penduduk setempat dengan membawa pengaruh dalam hal tradisi, budaya dan juga agama Hindu bagi penduduk setempat. Satu tambahan lagi adalah Teori Arus Balik (F.D.K Bosch) yang menyatakan pengaruh Hindu juga di dapat dari masyarakat Nusantara yang belajar

menimba ilmu di India, lalu setelah kembali turut menyebarluaskan ajaran Hindu kepada masyarakat sekitarnya (Nurkencana, 1997 : 86).

Demikian akhirnya agama Hindu semakin berkembang di hampir seluruh wilayah Nusantara. Ketika kemudian agama Hindu memasuki jagat Bali sekitar abad ke – 8 masehi, ajaran *Catur Warna* pun tetap menjadi bagian dari keyakinan (*sradha*) Hindu. Hanya saja sejarah mencatat, ajaran *Catur Warna* mengalami perubahan, tepatnya bermetamorfosa (apakah dalam arti pengaburan atau penyimpangan), yang semula pembagian golongannya berlandaskan asas profesionalitas (*guna-karma*) menjelma menjadi berdasarkan atas hak/klaim identitas, sebagai penanda *Wangsa* yang meneruskan garis keturunan (genealogis).

Contoh, jika selama ini pendahulunya (*Guru Rupaka/purusa/orang tua*) berasal dari *Warna Brahmana*, maka keturunan selanjutnya, meski tidak selalu meneruskan tugas/lapangan pekerjaan (*guna-karma*) di bidang keagamaan/kerohanian, mereka tetap akan mewarisi istilah kebrahmanaannya sebagai “warih/trah/prati sentana” (keturunan) langsung. Begitu pula halnya dengan golongan *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra*, yang bahkan dilengkapi pula dengan embel embel titel/gelar sebagai penciri identitas genealogis yang selama ini tetap melekat pada keturunannya secara turun temurun. Perubahan asas *guna-karma* dalam *Catur Warna* menjadi asas identitas kelahiran/keturunan inilah yang kemudian melahirkan *Wangsa* dengan *Catur Wangsanya*. Namun dengan tetap mengadopsi istilah pengelompokan/penggolongannya, Sehingga secara berturut-urur akan menjadi *Wangsa Brahmana*, *Wangsa Ksatria*, *Wangsa Waisya* dan *Wangsa Sudra*, atau dengan penyebutan sebaliknya; *Brahmana Wangsa*,

*Ksatria Wangsa*, *Waisya Wangsa* (yang dikelompokkan lagi menjadi *Tri Wangsa/Wong Jero*), dan *Sudra Wangsa* yang lazim disebut *Wong Jaba* (orang-orang yang berada diluar lingkungan *Geria*, *Puri* atau *Jero*).

## 2. Wangsa

Penelusuran kata “Wangsa” (*Wangsa*) dalam beberapa sumber kamus, baik yang online maupun manual/konvensional, menemukan arti yang sama yaitu : 1) *keturunan raja; keluarga raja* : -- Syailendra; 2) *bangsa*. *Kewangsaan/ke-wang-sa-an/n* perihal *wangsa*, yang berhubungan dengan *wangsa* (Pranala (link) :<https://kbbi.web.id/wangsa>, diakses tanggal 19 Juli 2020). Kata “Wangsa” ini juga sebenarnya merupakan bentuk perubahan dari kata “Bangsa” (dimana huruf depan “b” dan “w” tergolong ‘sewarga’ (satu keluarga), sehingga bisa saling merubah, seperti contoh lain dalam kata “bawa” bisa menjadi “wawa” (artinya membawa); “bangun” menjadi “wangun” (membangun), dll. Salah satu arti kata “Bangsa” itu adalah ‘kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan’. *Berbangsa/ber-bang-sa/v* 1 berasal dari *bangsa*; *kebangsaan/ke-bang-sa-an/ n* 1 ciri-ciri yang menandai golongan *bangsa* (Pranala (link):<https://kbbi.web.id/bangsa>, diakses tanggal 19 Juli 2020).

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Wangsa” termasuk ragam Bahasa *Klasik* kelas *Nomina* (*kata benda*), yang artinya : *keturunan raja; keluarga raja*, seperti contoh *Wangsa Syailendra*; atau *bangsa*. Kata “Wangsa” juga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Bisa juga berarti *dinasti*, atau *kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan* (keluarga yang sama). Dalam sejarah Indonesia banyak kerajaan di bumi

nusantara yang rajanya berasal dari satu garis keturunan yang sama, misalnya Wangsa Saylendra, Wangsa Sanjaya, Wangsa Isana, Wangsa Warmadewa, dll. Di dalam Kamus Bali – Indonesia Beraksara Bali dan Latin, kata “Wangsa” diartikan lebih menitik ke arah hubungannya dengan pembagian golongan masyarakat berdasarkan kelahiran seperti “Tri Wangsa”, atau “Catur Wangsa” (Antara, dkk. Ed., 2009 : 815).

Merujuk beberapa sumber leksikal di atas, dapat dijelaskan bahwa kata “Wangsa” dalam konteks artikel ini lebih diartikan sebagai pembagian golongan masyarakat berdasarkan atas penerusan garis keturunan, terutama di Bali yang menganut sistem kekerabatan “Purusa”, yang ternyata tidak selalu sama pengertiannya dengan sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan laki-laki dalam arti fisik). Kebalikan dari patrilineal adalah matrilineal yang menempatkan perempuan (secara fisik) sebagai penerus keturunan. Meskipun tidak persis sama pengertiannya, di Bali ada sistem berlaku yang disebut “Purusa dan Predana”. Istilah *Purusa* ini tidak bisa serta merta diterjemahkan menjadi patrilineal atau *Predana* diterjemahkan menjadi matrilineal. Kedua sistem ini erat kaitannya dengan sistem yang dianut dalam hukum perkawinan dan juga hukum waris dimana hanya pihak *Purusa* yang berhak menjadi penerus keturunan dan ahli waris pada keluarga itu (Asmarajaya, 2019 : 114).

*Purusa* yang dimaksud disini adalah sebagai penanda “status” (bukan fisik/gender). Karena secara hukum, sosok laki-laki selain bisa berkedudukan sebagai *Purusa*, bisa juga sebagai *Predana*, begitupun sebaliknya untuk kaum perempuan, selain kodratnya adalah *Predana* ia bisa juga berkedudukan sebagai *Purusa*. Seperti tampak jelas dalam hukum perkawinan “nyentana” dimana status

*Purusa* pengantin pria berubah menjadi *Predana*, sebaliknya pengantin perempuan yang semula berstatus *Predana* berubah menjadi *Purusa*.

Cukup jelas bahwa yang namanya “Wangsa” (*Catur Wangsa*), meskipun secara istilah, model pembagian/pengelompokannya diadopsi dari konsep *Catur Warna* yang berdasarkan asas profesionalitas (*guna-karma*), namun pada kenyataannya *Catur Wangsa* lebih berpijak pada asas identitas, dengan menjadikan status *Purusa* sebagai penanda paling sah untuk meneruskan garis keturunan suatu keluarga, lengkap dengan tingkatan *Wangsa*, *Soroh/Klan*, plus Titel/Gelar, beserta atribut, dan bahkan perlakuan “khusus” lainnya yang secara sosial tradisional masih diakui di tengah masyarakat. Ini berarti, keberadaan *Catur Wangsa* tidak lain dari bentuk perubahan menyimpang dari konsep ajaran *Catur Warna*. Sampai kemudian di dalam banyak kamus (versi Indonesia maupun asing), selalu mengartikan, tepatnya menyamakan kata *Warna* atau *Wangsa* dengan *Kasta* sebagai tingkatan dalam masyarakat (Poerwadarminta, 1986 : 1148).

Menelusuri jejak perjalanan sejarah *Wangsa* ini, tampaknya mulai dapat diketahui sejak kehadiran Danghyang Nirartha menjadi *purohita* (penasihat bidang kerohanian) pada masa Kerajaan Gelgel (Klungkung-Bali) dibawah pemerintahan Dalem Waturenggong (1460-1550), yaitu dengan dicanangkan dan diterapkannya sistem “Catur Wangsa”. Berbeda dengan konsep *Warna* yang membedakan seseorang atas dasar profesionalitas, dalam sistem *Wangsa* yang berdasarkan keturunan/kelahiran dan ditarik secara vertikal, menyebabkan ada satu keturunan yang merasa lebih tinggi dan ada pula yang dipandang lebih rendah. Imbas berikutnya, ada kelompok keturunan yang secara tradisional-feodalistik mendapatkan (meminta) perlakuan istimewa terutama

dalam konteks relasi sosial di tengah masyarakat (Nurkancana, 1997 : 149).

Secara faktual, sebenarnya masyarakat Bali dibagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama, yang secara tradisional dikatakan berasal dari keturunan Dang Hyang Dwijendra dan Dang Hyang Astapaka. Kedua pendeta ini diyakini sebagai cikal bakal *Wangsa Brahmana Siwa* dan *Brahmana Bodha* di Bali. Golongan kedua, berasal dari keturunan para *Ksatria* yang berasal dari Kediri dan Majapahit, dan disebut sebagai *Ksatria Wangsa*, sedangkan golongan ketiga adalah *Jaba Wangsa*.

Bagaimana halnya dengan satu golongan lagi yaitu *Waisya* yang jika mengacu *Catur Warna/Catur Wangsa* juga termasuk di dalamnya ?. Tampaknya secara samar-samar tetap eksis keberadaannya, terutama ketika mengacu struktur *Tri Wangsa* versus *Jaba*. *Tri Wangsa* meliputi golongan *Brahmana*, *Ksatria* dan *Waisya*, sedangkan diluar itu disebut golongan *Sudra (Jaba Wangsa)*. Meskipun kalau ditelusuri jejaknya silsilahnya bisa saja orang *Jaba Wangsa* itu berasal dari keturunan seorang *Ksatria* atau atau *Brahmana*.

### 3. Soroh

Membuka Kamus Bali – Indonesia Beraksara Bali dan Latin (Antara, dkk. Ed., 2009 : 677), kata “Soroh” artinya *jenis*, atau golongan. “Asoroh”, mengandung arti : 1. *satu jenis*, cth buah-buahan satu jenis; 2. *Selengkapnya*, cth sajen “suci” selengkapnya. Kemudian ada kata “Nyoroh” artinya *mengatur sajen selengkapnya*, lalu kata “Masoroh” berarti (*sudah diatur selengkapnya*); “Sorohang” berarti *atur menurut jenisnya, aturlah sampai lengkap (sajen)* ; dan “Sorohan” artinya *nama sajen pensucian*.

Kaitannya dengan istilah “Soroh” (sering juga disebut *Warga/Wargi*) dalam artikel ini tidak lain diartikan sebagai

golongan, tentunya penggolongan masyarakat. Penggolongan mana didasarkan atas kesamaan asal usul identitas keturunan seseorang atau kelompok orang, yang berkilat pada kesatuan leluhur pada tempat suci pemujaan yang disebut *Dadia* dan atau *Kawitan*. Jika istilah *Warna* murni sebagai penggolongan masyarakat berdasarkan atas asas *guna* (sifat, minat, bakat) dan *karma* (pekerjaan), lalu *Wangsa* berdasarkan atas keturunan (genealogis), maka apa yang disebut *Soroh* ini meski identik bahkan dapat dipersamakan dengan istilah *Wangsa*, namun lebih spesifik menukik (detail) pada kejelasan identitas atas asal-usul leluhur yang menjadi objek pemujaan pada tingkatan *Dadia/Dadya* dan *Kawitan*.

Perbedaannya, kalau *Warna* dan *Wangsa* hanya terbagi atas empat golongan yang dipersamakan penyebutan istilahnya, sehingga menjadikan *Catur Warna* itu juga sebagai *Catur Wangsa* dengan urutan pembagian yang sama pula. Bahkan dalam golongan *Catur Warna/Wangsa* ini dapat dipilah lagi menjadi dua bagian besar, yaitu golongan *Tri Warna/Tri Wangsa (Brahmana, Ksatria dan Waisya)*, dan diluar itu disebut golongan *Sudra (Jaba Wangsa)*. Ketika dikaitkan dengan istilah *Soroh*, berbeda pula penyebutannya, yaitu *Soroh Menak (Tri Wangsa)* yang disebutkan sebagai orang-orang yang bertempat tinggal di “Jeroan” (dalam Puri, Geria atau Jero), satunya lagi *Soroh Jaba (Sudra)* yang bermukim diluar, dengan sebutan *umah*, *pondok*, *kubu*, bahkan *rompyok*, sebagai tempat tinggalnya.

Jika istilah *Soroh* itu ditelisik lebih dalam lagi, ternyata menjadi semakin melebar dan meluas keterkaitannya. Analoginya, jika *Warna/Wangsa* diandaikan sebagai pohon, maka *Soroh* itu bagaikan batang atau rantingnya lengkap dengan pucuk bunga indah mewangi yang tiada lain segala macam embel titel/gelarnya. Contoh, sosok *Brahmana*



Danghyang Nirartha sendiri yang dikatakan memiliki lima (5) orang istri, dari setiap istrinya menurunkan *Wangsa Brahmana* dengan *Soroh* yang berbeda-beda. Dikatakan, keturunan dari istri pertama berasal dari Kediri (Jawa) disebut *Soroh Brahmana Kemenuh*; keturunan dari istri kedua dari Pasuruan (Jawa) disebut *Soroh Brahmana Manuaba*; keturunan dari istri ketiga dari Blambangan (Jawa) disebut *Soroh Brahmana Keniten*; keturunan dari istri keempat (adik Bendesa Mas dari Bali) disebut *Soroh Brahmana Mas*, dan keturunan dari istri kelima (abdi Bendesa Mas) disebut *Soroh Brahmana Hantapan/Antapan* (Suhardana, 2005 : 54).

Setelah golongan *Wangsa Brahmana* melahirkan banyak *Soroh/Warga*, golongan *Wangsa* lainnya juga memunculkan hal yang sama. Misalnya dalam lingkup *Wangsa Ksatria*, yang bergerak di bidang pemerintahan memunculkan banyak *Soroh/Warga Ksatria/Ksatriyeng* yang umumnya berasal dari *Soroh Arya*, seperti Arya Kresna Kepakisan, Arya Kenceng, Arya Belog, Arya Sentong, Arya Kanuruhan, Arya Tegeh Kori, Arya Wang Bang Pinatih, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Belog, Arya Kuta Wandira, dll. Golongan lain yang selama ini diposisikan sebagai *Wangsa Sudra* yaitu *Soroh/Warga Pasek* misalnya (yang sebenarnya berasal dari keturunan Brahmana/Mpu), juga memunculkan banyak *Soroh*, diantaranya *Soroh Pasek Gelgel*, *Pasek Kayuselem*, *Pasek Badak*, *Pasek Kedonganan*, *Pasek Kadangkan*, *Pasek Ngukuhin*, *Pasek Gaduh*, dll. Ada juga *Soroh/Warga Pande*, *Bujangga Waisnawa*, *Dalem Klungkung*, *Satria Pradewa*, dll.

Rupanya, apa yang disebut *Soroh/Warga* ini menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Bali dalam menjalin dan membina kekerabatan secara lahir dan batin (*sekala-niskala*), sekaligus sebagai ikatan sosial yang merujuk pada

garis keturunan (*klen*) tunggal. Intinya, *Soroh* atau *klen* ini mengacu kepada kesamaan leluhur atau lumrah disebut *tunggal kawitan*. Tiap *Soroh* menyakini bahwa seluruh anggota kelompok warga (*semeton*) mengakar dari satu aliran keturunan leluhur yang *tunggal sembah* dalam satu Pura yakni *Pura Dadia* atau *Pura Kawitan*. *Pura Kawitan* sendiri merupakan tempat suci umat Hindu di Bali untuk memuja leluhurnya yang berasal dari latar belakang keluarga berbeda tetapi tetap berada dalam satu garis keturunan (*trah/klen*) yang sama. Lebih kecil dari *Dadia/Kawitan*, setiap pasemetonan juga memiliki tempat suci pemujaan leluhur, mulai dari tingkat rumah tangga/keluarga yang disebut *Sanggah/Merajan*, hingga meluas menjadi *Pura Ibu*, *Pertiwi*, *Panti* atau *Paibon*, tergantung pada cakupan besar kecilnya jumlah *Warga/Wargi pasemetonannya*. Hal inilah yang menjadikan sistem kekerabatan antar *pasemetonan* dari suatu *Soroh* memiliki hubungan lebih spesifik dengan tetap menjalin hubungan antar satu dengan yang lainnya (Soebandi, 1981 : 8).

Ditelusuri jejak sejarahnya, era awal kemunculan *Soroh* ini tampaknya mulai menggeliat sekitar tahun 1950-an. Salah satu *Soroh* yang berkembang dan memiliki jumlah cacah jiwa terbesar sekaligus berpengaruh di Bali adalah *Soroh Pasek*, yang pada tahun 1952 melahirkan suatu paguyuban bernama *Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR)*. Lahirnya *MGPSSR* ditengah warga *Pasek* bertujuan untuk meningkatkan *sradha* dan *bhakti* kepada *Ida Bhatara Kawitan* dan mewujudkan Bali yang unggul sesuai *Bhisama* untuk pengabdian kepada agama, bangsa dan negara (Soebandi, 2009 : 35). Setelah itu hingga sekarang sudah banyak muncul organisasi *pasemetonan* berlabel *Soroh* dengan mengambil nama *Bhatara Kawitannya* sebagai nama perkumpulannya.

Bila dibandingkan dengan pengertian *Wangsa* yang ditarik menurut garis vertikal, sehingga mengesankan adanya level tinggi-atas/rendah-bawah terhadap status harkat/derajat/martabat suatu golongan, maka kehadiran *Soroh* ini secara faktual hanya sebagai penanda adanya ikatan darah berdasarkan kesamaan/kesatuan keturunan (*trah/warih/prati sentana*) yang dibuktikan melalui kiblat bhaktinya pada satu *Dadia/Kawitan (tunggal sembah)*. Cukup jelas, bahwa *Soroh* itu pengertian dan implementasinya berbeda dengan *Wangsa*. Baru kemudian ketika *Soroh-Soroh* ini bermuara pada *Wangsa* yang menaungi/melingkupinya, mulai kelihatan pada tingkatan mana mereka diposisikan, apakah tergolong *Tri Wangsa (Jero)* atau *Sudra Wangsa (Jaba)*, itupun bisa diterima ataupun tidak, tetapi demikianlah adanya sebagai realita sosial kehidupan masyarakat Bali.

#### 4. Kasta

Kata "Kasta" berasal dari bahasa Portugis "Caste" yang berarti pemisah, tembok, atau batas. Timbulnya istilah *Kasta* dalam masyarakat Hindu adalah karena adanya proses sosial (perkembangan masyarakat) yang mengaburkan pengertian *Warna*. Pengaburan pengertian *Warna* ini melahirkan tradisi *Kasta* yang membagi tingkatan seseorang di masyarakat berdasarkan kelahiran dan status keluarganya. Istilah *Kasta* ini sebenarnya tidak dikenal apalagi diatur di dalam kitab suci Weda. Kata "Kasta" itu sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti "kayu", sama sekali tidak ada hubungan dengan penggolongan masyarakat (Wiana dan Santeri, 1993 : 18).

Membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "Kasta" [kas·ta] merupakan kata Nomina (kata benda), yang diberi arti *golongan (tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat beragama Hindu*, yaitu : kasta *Brahmana* : golongan

pendeta dalam masyarakat Hindu; kasta *Ksatria* : golongan bangsawan dan prajurit dalam masyarakat Hindu; kasta *Waisya*: golongan pedagang, petani, dan tukang dalam masyarakat Hindu; kasta *Sudra*: golongan rakyat biasa dalam masyarakat Hindu; dan bahkan ditambahkan satu lagi yaitu kasta *Paria* : golongan rakyat jembel (yang hina-dina) dalam masyarakat Hindu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1986 : 449), salah satu arti 'Warna' adalah "Kasta" (tingkatan dalam masyarakat), yang artinya golongan orang di masyarakat menurut tingkat kedudukannya (terutama di India, ada empat kasta, yakni : *brahmana, ksatria, waisya* dan *sudra*).

Jika ditelisik, sebenarnya istilah "Kasta" tidak sama dengan "Warna". Apalagi kata *Kasta* itu sendiri bukan berasal dari Bahasa Sansekerta. *Kasta* adalah stratifikasi masyarakat sebagai produk sosial historis masyarakat India pada masa lampau. *Kasta* di India ini memang membedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunan (hubungan darah dan warna kulit), secara vertikal genealogis. *Kasta* membagi masyarakat menjadi empat golongan, yaitu *Kasta Brahmana* tertinggi, *Ksatria* golongan kedua, *Waisya* dan *Sudra* kasta yang paling rendah. Sedangkan tambahan kasta *Paria* dianggap sebagai *Kasta Candala*, artinya kelompok orang cacat/rendahan/nista/hina dina.

Menyimak pengertiannya, jelas apa yang disebut "Kasta" amat bertentangan dengan ajaran Agama Hindu. Kalau *Warna* muncul pada waktu diturunkannya Weda ke dunia oleh Tuhan Yang Maha Esa sekitar 6.000 tahun sebelum masehi (hal ini didasarkan pada Purusa Sukta Rg Weda Mandala X), sedangkan *Kasta* muncul kira-kira setelah tahun 1500 SM (hal ini didasarkan pada teori Lingua Franka yang dikemukakan oleh Prof. Gilles.) Untuk memastikan sejak kapan *Kasta* muncul di India memang suatu persoalan yang amat

sulit membuktikannya. B.A. Gait mengemukakan pendapatnya bahwa mula-mula bangsa Arya tak suka perkawinan antar suku. Suku bangsa Arya di India menganggap suku asli bangsa Dravida yang dikalahkannya lebih rendah harkat dan martabatnya.

Menurut hypotesa Prof. Giles, lama-kelamaan orang-orang Arya mengalami kesulitan mendapatkan istri. Meskipun akhirnya terjadi juga perkawinan antar suku bangsa Arya yang kulitnya putih dengan suku bangsa Dravida yang warna kulitnya hitam. Percampuran suku bangsa Arya dengan suku bangsa Dravida ini memunculkan pelapisan sosial yang tumbuh menjadi *Kasta*. Orang-orang Arya yang kulitnya putih, tubuh tinggi dan unggul kecerdasannya menjadi lapisan atas atau *Kasta* yang lebih tinggi dengan hak-hak istimewanya.

Suku-suku bangsa Arya sebelum memasuki India pernah juga menetap di daerah Oxus dan sudah memiliki pembagian masyarakat berdasarkan profesi. Ketiga golongan itu ialah golongan rohaniawan dan cendekiawan yang berkembang menjadi *Warna Brahmana*, para prajurit dan politisi berkembang menjadi *Warna Ksatria*, sedangkan golongan pedagang dan usaha-usaha ekonomi lainnya menjadi *Warna Waisya*. Demikian timbulnya *Kasta* di India yang amat berbeda dengan sistem *Warna* menurut ajaran Hindu yang berdasarkan kitab suci Weda. Namun bagi mereka yang sudah berpikir modern, tidak lagi memandang *Kasta* itu sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam perilaku sosial. Di India pergeseran antara pandangan yang tradisional dan modern amat kabur, lebih bersifat kasuistik. Hal ini mungkin disebabkan karena India adalah negara sekuler di mana kehidupan beragama terlepas dari urusan negara. Di kalangan masyarakat Hindu modern, telah terjadi iklim bebas dalam mendalami Weda,

sehingga tidak lagi dipelajari kalangan *Brahmana* saja.

Kebangkitan untuk kembali kepada konsep *Catur Warna* sebagaimana dimaksudkan oleh kitab suci Hindu sudah sejak lama berlangsung di India. Misalnya, gerakan seorang Brahmana Agung yang bernama Swami Dayananda, dimulai tahun 1825. Mereka mengembangkan pandangan dan pemikiran untuk kembali kepada Weda. Seseorang baru diberikannya *tali upawita* atau tali suci lambang kebrahmanaan setelah orang itu benar-benar mempelajari dan melaksanakan Weda.

Sosok seperti Mahatma Gandhi yang disebut Bapak Kemerdekaan India, adalah tokoh Hindu yang tidak lagi berpegang pada kasta karena sudah kembali kepada kebenaran ajaran Hindu (Wedā), termasuk *Catur Warna*. Pembaharu Hindu lainnya adalah tokoh besar Rama Krisna Mision yaitu Swami Wiwekananda. Pandangan Swami Wiwekanandalah yang mampu menarik persamaan-persamaan Hindu di seluruh dunia, sejak beliau tampil di berbagai kota di Amerika tahun 1893. Demikian pula Swami Satya Narayana di India Selatan yang punya pengikut di seluruh dunia. Swami Satya Narayana bahkan mengatakan di dunia ini hanya ada satu kasta yaitu “Kasta Kemanusiaan”.

Gerakan-gerakan lain seperti Sanatana Dharma, Brahmasamad dan lain-lainnya adalah gerakan yang tidak lagi menentukan kebrahmanaan seseorang dari keturunannya, tetapi benar-benar dilihat dari sejauh mana Weda telah dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Umumnya asram-asram yang besar di India seperti Swarga Asram, asramnya Swami Rama tidak lagi melihat pengikutnya dari keturunannya. Bahkan pengikut-pengikutnya banyak pula dari orang asing. Seperti di India Selatan, Prasanti Nilayam Asram pengikutnya dari semua keturunan, bahkan dari masyarakat berbagai negara

seluruh dunia (Wiana dan Santeri, 1993 : 19-20).

Demikian pula di Bali, gerakan untuk kembali pada sistem *Catur Warna* yang kemudian berubah menjadi *Catur Wangsa* juga sudah dilakukan pada masa Bali Kuna, tepatnya pada periode pemerintahan Raja Dharma Udayana bersama permaisurinya Gunapria Dharmapatni (Saka 910/988 M). Pada masa itu pemerintahan beliau didampingi beberapa orang pandita dari Jawa Timur, diantaranya yang sangat berjasa adalah Mpu Kuturan. Jasa Mpu Kuturan yang dipandang penting adalah dalam meredam konflik antar sekte dan antar *Wangsa/klen* yang pada masa itu terus terjadi di Bali. Dalam suatu pertemuan dengan komponen masyarakat Bali di desa Samuan Tiga-Gianyar, beliau mengusulkan pendirian *Kahyangan Tiga* sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat tanpa memandang sekte maupun *Wangsa/klen*, dan lebih menekankan pada kesatuan geografis (disebut desa adat) yang ada di masing-masing desa di Bali, dibandingkan dengan mengedepankan ikatan atas dasar *Warna* (profesi) atau *Wangsa* (keturunan) (Nurkencana, 1997 : 140). Namun usaha itu kembali dipatahkan ketika periode pemerintahan Raja Bali di bawah kepemimpinan Dalem Waturenggong (abad ke- 15-16 M), dimana *purohita* Dang Hyang Nirartha kembali menghidupkan sistem *Catur Wangsa* yang jelas-jelas membedakan golongan berdasarkan keturunan (*trah/warih*).

Seperti halnya di India pada abad ke-19, protes sosial terhadap sistem *Wangsa* yang dilabeling sebagai *Kasta* dan juga adat-istiadat yang usang terjadi pula di Bali. Benih-benih ketidakpuasan terhadap adat-istiadat yang telah usang serta sistem *Wangsa* yang berkembang menjadi sistem *Kasta*, mulai menyebar. Namun sekarang, setelah berabad-abad mengalami pasang surut “perlawanan”, masyarakat Bali pada

umumnya sudah menganggap sistem *Kasta* itu tidak berfungsi lagi. Lebih-lebih mulai banyaknya buku-buku yang langsung mengacu pada kitab suci Weda, yang jelas-jelas menyebutkan bahwa ajaran Hindu tak mengenal sistem *Kasta*, tetapi sistem *Warna*. Namun, harus diakui masih ada yang berpendapat bahwa status sosial yang pernah diraih para leluhur mereka dahulu, harus tetap dilestarikan kepada keturunannya, walaupun mereka tidak lagi menyandang predikat yang menyebabkan melekatnya status sosial itu.

#### 4. PENUTUP

Mencermati paparan di atas, jika kemudian dirunut, maka terkonfirmasi bahwa *Warna* itu merupakan ajaran agama Hindu yang ditentukan berdasarkan *guna-karma* (sifat, bakat atau pekerjaan). Dalam bahasa sekarang *Warna* itu dapat dikatakan berbasis asas profesionalitas, sehingga bersifat fungsional horizontal (sejajar, setara). Sedangkan *Wangsa* dengan jelas berbasis keturunan dan berorientasi pada leluhur/*Kawitan* (genealogis), serta ditarik menurut garis struktural vertikal (atas/tinggi/bawah-rendah). Sementara itu perihal *Soroh*, sebenarnya ekuivalen dengan *Wangsa*, sama-sama sebagai penanda identitas tentang asal-usul jati diri (*trah/waris/prati sentana*) orang Bali. Bahwa kemudian muncul istilah impor dari Portugis bernama *Kasta*, sebenarnya adalah tidak lain dari simpulan istilah, bahwa apapun namanya, entah itu *Warna*, *Wangsa* atau *Soroh* cenderung ditafsir atau diartikan sebagai bentuk pengelompokan/penggolongan atas diri manusia berdasarkan tarikan garis vertikal. Sehingga ada golongan yang merasa kedudukannya lebih tinggi (atas), sementara golongan lainnya diposisikan dibawah (rendah), bahkan adakalanya direndahkan.

Berarti soal *Warna* ini dengan tegas dapat dinyatakan sama sekali tidak berkaitan dengan hal ihwal kelahiran/keturunan atau pewarisan suatu golongan. Bahwa di dalam masyarakat Adat Bali masih tetap eksis budaya feodalisme kewangsaan, itu fakta sejarah yang tak terbantahkan. Hanya saja Desa Adat sebagai kesatuan hukum masyarakat Bali kini harus jelas, lugas dan

tegas dalam memosisikan semua krama dalam status, kedudukan, hak dan kewajiban yang setara, tanpa membedakan apapun golongan *Warna*, *Wangsa*, *Soroh* atau *Kastanya*. Prinsip dasarnya adalah *suka duka menyama braya* demi penguatan dan pemajuan Desa Adat sebagai benteng budaya dan agama Hindu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Nala, dkk (editor). 2009. *Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin dan Bali*. Denpasar: Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.
- Ardhana, I.B. Suparta. 2002. *Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia*. Surabaya : Paramita.
- Asmarajaya, I Made. 2019. "Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali", diterbitkan pada Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar . ISSN : 2720-9555.
- Nurkancana, Wayan. 1997. *Menguak Tabir Perkembangan Hindu*. Denpasar. Pustaka Bali Post.
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Pudja, G dan Tjokorda Rai Sudharta. 1977/1978. (*Manusmrti*). Jakarta : Departemen Agama RI.
- Pudja, G. 1981. *Bhagawadgita (Pancama Weda)*. Jakarta : Mayasaari.
- Putra, Ida Bagus Rai, dkk., Editor. *Swastikarana Pedoman Ajaran Hindu Dharma*. Denpasar : Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Soebandi, Ktut. 1981. *Pura Kawitan/Padharman dan Panyungsungan Jagat*. Denpasar : Guna Agung.
- Soebandi, Jro Mangku Gde. 2009. *Mengenal Leluhur dari Dunia Babad*. Denpasar : BP.
- Suhardana, K.M. 2005. *Seri Babad Bali, Babad Nyuhaya*. Surabaya : Paramita
- Wiana, Ketut, dan Raka Santeri. 1993. *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha
- Widana, I Gusti Ketut. 2009. *Menjawab Pertanyaan Umat*. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha.
- <https://kbbi.web.id/wangsa>, diakses tanggal 19 Juli 2020
- <https://kbbi.web.id/bangsa>, diakses tanggal 19 Juli 2020